

## Strategi Pemerintah Desa dalam Optimalisasi Potensi Pertanian Desa Pandanajeng, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang Tahun 2025

Serlina Putri Setyowati<sup>1</sup>, Muhammad Mujtaba Habibi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang

Dikirimkan: 14 Juli 2025

Direvisi: 29 Juli 2025

Diterbitkan: 30 September 2025

### INTISARI

Desa Pandanajeng, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian yang dilakukan optimalisasi sebagai arah pembangunan desa. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting sebagai referensi kebutuhan evaluatif dalam pelaksanaan pemerintahan serta kajian teoritis *good governance*. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan: (1) Potensi pertanian di Desa Pandanajeng, (2) Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pandanajeng dalam optimalisasi potensi pertanian desa, (3) Faktor pendukung dan penghambat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, observasi, dan studi dokumen. Uji keabsahan data penelitian adalah dengan triangulasi sumber. Hasil analisis temuan penelitian menunjukkan bahwa Desa Pandanajeng memiliki *icon* sebagai penghasil sawi, bayam, dan kangkung. Strategi yang dibentuk diantaranya: (1) Pembentukan kelompok tani, (2) Pendampingan pertanian oleh Kuwowo, (3) Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pertanian, (4) Membuka peluang kerja sama, dan (5) Mengimplementasikan kebijakan dalam mendukung program ketahanan pangan. Optimalisasi potensi pertanian desa memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat baik dari sudut pandang pemerintah desa dan masyarakat. Kesimpulan dari strategi yang telah dilaksanakan adalah telah mengaktualisasikan prinsip-prinsip *good governance* namun masih belum secara utuh. Sehingga, perlu upaya tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk dapat meningkatkan peluang keberhasilan strategi optimalisasi potensi pertanian desa.

### KATA KUNCI

Optimalisasi Potensi Pertanian; Pemerintah Desa; Strategi

### Korespondensi:

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Departemen Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang.

Jl. Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur

Email: serlina.putri.2207116@students.um.ac.id

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah serta dikenal sebagai negara agraris. Mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan kondisi ekonominya pada sektor pertanian dengan berminat sebagai petani. Rumah tangga petani di Indonesia Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), (2023) berjumlah 27.368.114 rumah tangga. Petani milenial di Indonesia pada kisaran umur 19-39 tahun berjumlah 6.183.009 orang dengan persentase 21,93% dari jumlah petani. Luas lahan sawah Indonesia Menurut Kementerian Pertanian-Republik Indonesia, (2024) di tahun 2023 memiliki luas 7.384.341 Ha. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanian menjadi sektor yang cukup besar serta diandalkan dalam perekonomian Indonesia.

Pertanian memegang peran penting dalam perekonomian negara serta berkontribusi dalam pemenuhan pangan masyarakatnya (Ayun et al., 2020). Pertanian tidak hanya berperan dalam aspek pemenuhan pangan masyarakat melainkan juga turut berperan dalam kegiatan perekonomian negara. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar untuk pendapatan negara (Batubara & Pane, 2023). Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa Indonesia mengandalkan sektor pertanian sebagai salah satu penyumbang pendapatan negara dan memperoleh manfaat dalam hal pemenuhan pangan warga negaranya.

Tabel 1. Data Nilai ekspor bulanan hasil pertanian tahun 2025

Komoditas Ekspor Pertanian	Nilai Ekspor Bulanan Hasil Pertanian Menurut Komoditas (Juta US\$) Tahun 2025			
	Januari	Februari	Maret	April
Sayur-sayuran	4,5	9,9	7,0	29,0
Jagung	0,4	4,6	9,5	2,7
Buah-Buahan Tahunan	93,0	84,0	59,5	54,2

Sumber: Data Olahan Badan Pusat Statistika (BPS), (2025)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa komoditas pertanian selama Bulan Januari sampai dengan April tahun 2025 konsisten memberikan kontribusi dalam pendapatan negara. Hal tersebut dipaparkan dengan data pada tabel yang menunjukkan besaran nilai ekspor bulanan komoditas hasil pertanian sayur, jagung, dan buah dengan nilai ekspor yang tertera pada tabel dengan satuan (Juta US\$). Kegiatan ekspor dan impor serta perdagangan internasional menjadi penentu dalam kegiatan perekonomian suatu negara (Pane, 2023). Oleh karena itu pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam hal sektor pertanian karena berkaitan erat dengan kesejahteraan dan perekonomian negara.

Peran penting negara diamanatkan melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara memiliki tanggung jawab melindungi serta memajukan kesejahteraan umum. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah Indonesia memegang peran penting dalam upaya mengoptimalkan potensi pertanian dengan tujuan untuk kesejahteraan umum. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113 Tentang perlindungan dan pemberdayaan petani serta adanya kebijakan penetapan

lahan sawah dilindungi (LSD) menjadi wujud adanya kebijakan dalam mengusahakan pertanian berkelanjutan oleh pemerintah di Indonesia.

Pelaksanaan pemerintahan di Indonesia termasuk dalam usaha pertanian berkelanjutan dilakukan dengan mengenal asas otonomi daerah. Oleh karena itu, daerah memiliki hak serta wewenang dalam hal kepentingan menggali sumber pendapatan di daerahnya sendiri (N. F. Kurniawan & IR, 2021). Berdasarkan hal tersebut maka dalam hal urusan daerah pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu sendiri untuk mengelola potensi wilayahnya masing-masing dengan konsep otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang ekonomi negara diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan serta dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat daerah serta dapat mengembangkan suatu kebijakan dalam tujuan mengoptimalkan potensi (Gusnar Ismail, 2022).

Pelaksanaan otonomi daerah juga turut memberikan hak serta kewenangan kepada daerah kabupaten untuk mengelola potensi yang ada di wilayahnya. Kabupaten Malang menurut himpunan data Badan Pusat Statistika 2024 memiliki luas lahan pertanian sekitar 37.370 hektar. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Malang menjadi daerah potensial dalam sektor pertanian. Wilayah Kabupaten tidak berdiri sendiri melainkan terdiri atas beberapa kecamatan yang kemudian melibatkan desa-desa sebagai ujung tombak dalam pengelolaan potensi wilayah yang ada. Desa didefinisikan sebagai kumpulan dari beberapa pemukiman yang ada di wilayah pedesaan (Pasaribu, 2023). Desa berinteraksi secara langsung dengan masyarakatnya sehingga menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pemerintahan (Malawat & Octaviani, 2020).

Salah satu desa yang potensial dengan sumber daya alamnya adalah Desa Pandanajeng dengan potensi lokal dalam sektor pertanian yang dimiliki. Luas wilayah Desa Pandanajeng adalah 255.167 Ha yang terbagi dalam lahan fasilitas umum, pertanian, pemukiman, perkebunan/tegalan. Lahan pertanian sendiri memiliki luas 17.087 Ha dari luas keseluruhan wilayah Desa Pandanajeng. Secara fisik, kondisi geografis yang ditunjukkan didominasi oleh lahan pertanian yang dapat merepresentasikan potensi Desa Pandanajeng yakni dalam bidang pertanian.

Gambar 1. Peta Administrasi Desa Pandanajeng Tahun 2021



Sumber: Kompasiana, (2021)

Berdasarkan gambar peta administrasi tersebut dapat diketahui bahwa secara fisik Desa Pandanajeng dikelilingi oleh area persawahan yang menunjukkan potensinya dalam sektor pertanian. Kemudian Desa Pandanajeng sendiri merupakan bagian dari wilayah administratif Kecamatan Tumpang yang terdiri atas empat dusun yakni Dusun Bangilan, Dusun Tamiajeng, Dusun Bletok, dan Dusun Pandaan. Keempat dusun tersebut kemudian bersinergi dalam sektor pertanian sebagai penopang ekonomi Desa Pandanajeng.

Potensi pertanian Desa Pandanajeng membutuhkan upaya optimalisasi dalam hal untuk mendukung pertanian berkelanjutan serta mewujudkan desa yang mandiri dalam konteks ketahanan pangan. Hal tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah desa dalam memberikan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan potensi pertanian desa. Strategi merupakan suatu cara atau rencana jangka panjang yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Arifudin, O. 2021). Strategi dalam kegiatan pertanian merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani (Basmalah et al., 2023). Strategi adalah suatu perencanaan yang digunakan sebagai alat dalam mencapai sebuah tujuan yang diinginkan (Pipit Mulyah et al., 2020). Oleh karena itu, pemerintah desa berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi strategi dalam optimalisasi potensi pertanian desa.

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa akan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya karena disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh wilayahnya. Penelitian terdahulu yang relevan oleh Mukhirto & Fathoni, (2022) yang menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh pemerintah desa dalam mengembangkan objek wisata religi di Makam Kyai Ageng Imam Musakaf antara lain: 1) Menyusun rencana strategis serta program yang relevan dalam kegiatan pariwisata, 2) Pengembangan dalam jaringan wisata keagamaan, 3) Kerja sama dengan dinas pariwisata, 4) Memberikan pengawasan dalam pengelolaan wisata religi. Penelitian terdahulu yang relevan juga ditunjukkan oleh Maulana & Hasanah, (2024) dengan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa strategi yang digunakan pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata di Desa Banjarsari, Kabupaten Bandung adalah dengan beberapa strategi yakni penggabungan aspek kultural, sosial, keterlibatan masyarakat, dan aspek alamiah, menciptakan landasan dalam rangka untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa akan berbeda-beda sesuai dengan konteks yang merupakan tujuan dalam pengembangan potensi daerahnya. Pemerintah merancang sebuah rencana tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam kepentingan mengelola negara serta pelayanan terhadap kepentingan masyarakat yang diartikan sebagai strategi pemerintahan (D. Kurniawan et al., 2025). Potensi daerah yang dimiliki oleh masing-masing desa akan berbeda satu dengan lainnya sehingga dalam pengembangan atau optimalisasinya dilakukan dengan berdasarkan ada kearifan lokal. Kearifan lokal desa dapat berupa suatu potensi yang terlihat maupun tidak terlihat, yang tertulis maupun tidak tertulis yang sifatnya adalah turun temurun dan kemudian dijadikan dasar dalam pelestarian desa (Widyastuty, A. A. S. A., & Dwiarta, I. M. B. 2021).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam rangka untuk mengatur kepentingan masyarakat setempatnya sekaligus berperan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan yang diamanatkan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, desa memiliki peran penting dalam konteks pembangunan di wilayahnya berdasarkan kearifan lokal yang merujuk pada potensi lokal wilayahnya. Pengembangan potensi desa juga dapat diartikan sebagai upaya dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa untuk mencapai suatu kondisi yang sejahtera. Dalam hal ini, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan dalam hal pengelolaan sumber daya atau potensi desa demi kepentingan masyarakat berarti telah mengimplementasikan *good governance* dalam lingkup pemerintahan desa.

*Good governance* secara teoritis dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan dalam manajemen pembangunan, dalam hal pemberdayaan, serta pelayanan yang didasarkan pada konsep demokrasi yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat (Ramadhan, 2024). Era reformasi menjadi periode di mana terdapat tuntutan serta tantangan dalam mengembangkan *good governance* dalam hal pelayanan masyarakat, membuka ruang kreativitas masyarakat, dan penanganan masalah secara bijak sehingga menumbuhkan rasa aman di masyarakat yang diciptakan oleh pemerintah desa (Pasaribu, 2023). Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui jika pemerintah desa dapat mengambil peran pentingnya untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik dalam kaitannya untuk mengembangkan potensi desa.

Mengacu pada teori *good governance*, strategi yang dibentuk oleh pemerintah desa adalah bentuk respon terhadap kebutuhan masyarakat serta pengembangan potensi desa. Jika prinsip-prinsip *good governance* dilaksanakan secara utuh dalam membentuk dan menjalankan strategi dalam optimalisasi potensi pertanian desa maka akan dapat mencapai tujuan optimalisasi yang diinginkan secara tepat dan berdampak positif untuk potensi pertanian desa. Namun, dalam praktiknya di Indonesia secara umum prinsip-prinsip teori *good governance* tidak selalu diimplementasikan secara utuh dalam tata kelola pemerintahan. Dalam konteks penelitian ini maka akan terdapat faktor pendukung serta penghambat dalam keberhasilan strategi yang telah dibentuk dan dilaksanakan. Hal tersebut berarti bahwa terdapat kondisi kesenjangan antara teori dan juga praktiknya di lapangan. Selaras dengan hal tersebut, kajian (Nurhidayat, 2023) menunjukkan jika salah satu permasalahan mengenai *good governance* di Indonesia adalah belum sesuainya tuntutan kebutuhan masyarakat dengan pembaharuan pemerintahan yang berjalan.

Prinsip-prinsip dalam *good governance* dapat dijadikan sebagai indikator dalam penelitian ini apakah strategi pemerintah desa dalam optimalisasi potensi pertanian Desa Pandanajeng tahun 2025 telah mewujudkan *good governance* dalam pelaksanaan pemerintahannya. Prinsip-prinsip *good governance* menurut Baik, P. Y. (2024) antara lain:

- 1) Partisipasi, yakni adanya keterlibatan masyarakat secara aktif,
- 2) Akuntabilitas, yakni pertanggungjawaban dari pemerintah atas segala tindakan dan keputusan yang telah dibuat,

- 3) Transparansi, yakni keterbukaan informasi sekaligus proses dalam pengambilan keputusan,
- 4) Efektivitas dan efisiensi, yakni ketercapaian tujuan dengan penggunaan sumber daya yang optimal,
- 5) Supremasi hukum, yakni adanya penegakan hukum dan kepastian hukum,
- 6) Responsivitas, yakni kondisi di mana pemerintah mampu memberikan tanggapan atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat,
- 7) Kesetaraan dan inklusivitas, yakni pemerintah mampu menyediakan kesempatan bagi setiap kelompok masyarakat,
- 8) Orientasi konsensus, yakni terciptanya kesepakatan dengan pertimbangan dari berbagai sudut pandang masyarakat.

Penelitian ini menyajikan kebaruan kajian pada keterkaitan antara strategi yang dibentuk dalam lingkup spesifik yakni oleh pemerintah Desa Pandanajeng dalam optimalisasi potensi pertanian dalam praktik *good governance* berdasarkan prinsip-prinsipnya. Penelitian ini dapat memberikan kajian ilmiah untuk memberikan kontribusi baik secara teoritis terhadap kajian *good governance* maupun secara praktis sebagai referensi pelaksanaan pemerintahan serta evaluasi, baik dalam lingkup pemerintahan desa maupun skala yang lebih luas sehingga, menarik untuk dilakukan kajian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka, penelitian ini memiliki rumusan masalah yakni: 1) Bagaimana potensi pertanian Desa Pandanajeng? 2) Bagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pandanajeng dalam optimalisasi potensi pertanian desa? 3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam optimalisasi potensi pertanian desa? Selaras dengan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Potensi pertanian di Desa Pandanajeng, 2) Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pandanajeng dalam optimalisasi potensi pertanian desa, 3) Faktor pendukung dan penghambat dalam optimalisasi potensi pertanian desa.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali data berdasarkan tujuan penelitian. Pendekatan kualitatif dilakukan guna memahami suatu fenomena yang terjadi secara mendalam dengan dasar deskriptif naturalistik (Haryoko et al., 2020). Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus karena melakukan penelitian pada kondisi keunikan tertentu yang terbatas pada kondisi potensial Desa Pandanajeng, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan kondisi yang sebenarnya yakni Desa Pandanajeng, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang sebagai desa yang memiliki potensi pada sektor pertanian dan mengupayakan dalam hal optimalisasinya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 1) Wawancara semi terstruktur, 2) Observasi, dan 3) Studi dokumen. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1) Informan, 2) Peristiwa, 3) Dokumen. Informan dalam wawancara adalah pemerintah desa yakni kepala desa dan perangkat desa dalam institusi Pemerintah Desa Pandanajeng serta sampel dari masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian desa. Peristiwa yang terjadi selama peneliti melakukan observasi menjadi sumber data penelitian. Dokumen berupa Profil Desa Pandanajeng dan RPJM Desa juga menjadi sumber data dalam

penelitian ini. Sehingga uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan triangulasi sumber, yakni membandingkan data temuan di lapangan untuk memberikan data yang valid dan akurat. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Creswell dengan enam tahapan atau prosedur dalam Haryoko et al., (2020) sebagai berikut: 1) Data lapangan, 2) Mengolah dan mempersiapkan untuk analisis data, 3) Membaca keseluruhan data, 4) Mengkode data 5) Menghubungkan tema serta deskripsi, 6) Interpretasi data.

## PEMBAHASAN

### A. Potensi Pertanian Desa Pandanajeng, Kecamatan Tumpang, kabupaten Malang

Desa Pandanajeng adalah desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dengan luas wilayah keseluruhan 255,167 Ha. Luas wilayah secara keseluruhan tersebut kemudian terbagi atas lahan pertanian, pemukiman, perkebunan, fasilitas umum, dan lain-lain. Luas lahan sawah yang dimiliki Desa Pandanajeng adalah 186,10 Ha (Regency et al., 2025). Sebagian besar lahan di Desa Pandanajeng merupakan lahan produktif untuk kegiatan pertanian. Lahan yang kurang produktif adalah berupa tegalan dan juga pekarangan bambu. Lahan yang kurang produktif merupakan lahan dengan tanah kering sehingga kurang cocok jika digunakan untuk pertanian. Alternatif lain dalam pemanfaatan lahan yang kurang produktif adalah digunakan untuk kegiatan peternakan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui jika luas wilayah desa didominasi oleh lahan sawah atau lahan pertanian sehingga dominasi kegiatan ekonomi desa adalah berada pada sektor pertanian.

Gambar 2. Logo Desa Pandanajeng



Sumber: Akun Instagram Desa Pandanajeng @desapandanajeng

Logo Desa Pandanajeng merepresentasikan potensi dan kondisi identik yang dimiliki oleh desanya. Komoditas utama dari hasil pertanian di Desa Pandanajeng adalah sayur mayur yakni sawi, bayam, kangkung yang sekaligus sebagai *icon* desa. Hal tersebut sebagai bentuk implikasi dari jenis kondisi tanah pada wilayah desa. Kondisi kesuburan tanah yang bagus serta iklim sedang yang cocok untuk kegiatan pertanian. Jenis tanah di Desa Pandanajeng mayoritas hitam kecoklatan yang cocok untuk pertanian terutama sayur mayur yakni sawi, bayam, dan kangkung. Desa Pandanajeng adalah penghasil sayuran tertinggi di Kecamatan Tumpang dengan penduduknya yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani (Sholihah et al., 2015). Namun komoditas yang dihasilkan tidak hanya sayur, tetapi juga cabai, jagung, padi, palawija, dan buah-buahan seperti jeruk dan beberapa jenis jambu.

Tabel 2. Hasil-Hasil Pertanian di Desa Pandanajeng

No.	Tanaman	Produksi (Per-Tahun)
1.	Sayur Mayur	Relatif
2.	Padi	178 ton
3.	Jagung	1150 ton
4.	Cabai Rawit	3 ton
5.	Cabai Besar	6 ton
6.	Kelapa	150.000 butir
7.	Kubis	175 ton
8.	Tomat	160 ton
9.	Kacang Panjang	8 ton
10.	Lain-lain	-ton

Sumber: Dokumen Profil Desa Pandanajeng

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa hasil panen yang dihasilkan dari kegiatan pertanian di Desa Pandanajeng sangat bervariasi. Tidak hanya mengandalkan hasil panen sayur mayur sebagai komoditas hasil pertanian yang utama, tetapi juga hasil panen lain yang dihasilkan dari kegiatan pertanian desa. Diversifikasi tanaman pertanian menjadi penting karena merupakan salah satu cara yang memberikan dampak terhadap kelayakan ekologis, biaya yang lebih hemat, pengurangan ketidakpastian yang dapat terjadi pada petani (Pratiwi, 2021). Desa di Kecamatan Tumpang sebagai sentra penghasil tanaman hortikultura sayur mayur dan buah adalah Desa Pandanajeng, Bokor, Slamet, Kidal, Benjor, Duwet, dan Duwet Krajan (Lestariningsih & Ramadhani, 2024). Jumlah produksi hasil panen per tahun berdasarkan data tersebut juga menunjukkan jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, kondisi ekonomi Desa Pandanajeng tidak dapat dipisahkan dengan potensi sumber daya alam pertaniannya.

Potensi desa pada sektor pertanian membawa implikasi terhadap mata pencaharian yang diandalkan oleh masyarakatnya. Mayoritas masyarakat Desa Pandanajeng bermatapencaharian sebagai petani. Masyarakat yang bermatapencaharian sebagai petani, buruh tani, dan pemilik lahan kurang lebih sebanyak 60%. Hal tersebut menyumbang jumlah masyarakat di wilayah administratif Kecamatan Tumpang yang bermatapencaharian sebagai petani. Penduduk di Kecamatan Tumpang mayoritas bermatapencaharian sebagai petani yang disesuaikan dengan kondisi wilayahnya (Cahyani et al., 2024). Petani dan buruh tani sebagai mata pencaharian mayoritas penduduk berkaitan erat dengan potensi pertanian desa. Desa Menurut Simbolon et al., (2021) adalah suatu wilayah yang merupakan tempat tinggal suatu masyarakat dengan kondisinya yang relatif homogen dengan ketergantungan pada potensi serta kekayaan alam yang ada di wilayahnya.

## **B. Strategi Pemerintah Desa dalam Optimalisasi Potensi Pertanian Desa Pandanajeng, Kecamatan Tumpang, kabupaten Malang**

Prinsip responsivitas dalam *good governance* tercermin dalam terbentuknya beberapa strategi optimalisasi potensi pertanian oleh pemerintah Desa Pandanajeng.

Inovasi dan rasionalitas pemikiran harus dimiliki oleh pemerintah desa untuk dapat menjalankan sistem pemerintahan dengan baik (Syaifudin & Ma'ruf, 2022). Hal tersebut tentunya dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik pada tingkat desa sebagai tantangan yang harus dihadapi di masa kini.

Pemerintah membuat rencana tindakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam kepentingan mengelola negara serta pelayanan terhadap kepentingan masyarakat yang diartikan sebagai strategi pemerintahan (D. Kurniawan et al., 2025). Oleh karena itu, strategi bukan hanya sekedar cara, melainkan melibatkan proses perencanaan serta evaluasi dalam penerapannya. Strategi dibentuk melalui suatu proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Optimalisasi potensi pertanian telah tertuang melalui visi dan misi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2019-2025. Visi Desa Pandanajeng adalah "Terwujudnya Pandanajeng yang Madep Manteb Manetep" dengan salah satu misi sebagai upaya pencapaiannya yang berbunyi "Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa". Hal tersebut mencerminkan keterkaitan antara pertanian dengan perekonomian karena pertanian memegang peran yang krusial dalam bidang perekonomian negara serta memberikan kontribusi terhadap pemenuhan pangan masyarakat (Ayun et al., 2020).

Strategi yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam optimalisasi potensi pertanian Desa Pandanajeng adalah sebagai berikut:

1) Pembentukan Kelompok Tani "Sumber Tani"

Transparansi, kesetaraan dan inklusivitas dapat dicerminkan melalui pembentukan Kelompok Tani "Sumber Tani". Pemerintah desa membentuk kelompok tani sebagai suatu wadah organisasi para petani di Desa Pandanajeng untuk bersinergi. Kelompok tani merupakan wadah koordinasi, sarana penyampaian informasi dan aspirasi, serta sarana penataan dan pendistribusian pupuk subsidi. Koordinasi dilakukan ketika adanya pertemuan atau penyuluhan terkait dengan pertanian. Kemudian kelompok tani juga menerima kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik sebagai salah satu kegiatan yang pernah dilakukan. Adanya kesamaan kepentingan dalam aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan sumber daya disertai dengan keakraban beberapa petani dalam menjalankan usaha taninya membentuk kumpulan yang disebut dengan kelompok tani (Riani et al., 2021).

Tabel 3. Keanggotaan Kelompok Tani di Desa Pandanajeng

Kelompok Tani	Keanggotaan
Kelompok Tani Sumber Tani I	Petani Dusun Pandaan
Kelompok Tani Sumber Tani II	Petani Dusun Bletok
Kelompok Tani Sumber Tani III	Petani Dusun Tamiajeng
Kelompok Tani Sumber Tani IV	Petani Dusun Bangilan

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2025

Terdapat empat kelompok tani di Desa Pandanajeng yang dibagi sesuai dengan dusun sebagai dasar keanggotaan. Gabungan dari keempat kelompok tani tersebut membentuk Gabungan Kelompok Tani Desa Pandanajeng atau disebut

dengan Gapoktan Sumber Suko. Anggota dari kelompok tani yang sekaligus menjadi anggota gapoktan adalah masyarakat yang berminat mencari nafkah sebagai petani. Berdasarkan hasil temuan penelitian 90% petani terdaftar sebagai anggota kelompok tani Sumber Tani.

Koordinasi yang dilakukan oleh kelompok tani Sumber Tani biasanya adalah melalui perkumpulan yang diadakan. Penyampaian informasi dilakukan melalui grup *whatsapp* yang dikordinir oleh masing-masing kelompok tani. Tidak semua petani pada kelompok usia muda sehingga sistem perwakilan dilakukan untuk memfasilitasi petani dengan usia tua agar dapat tetap mendapatkan informasi sebagai anggota. Perwakilan diberikan oleh anak atau saudara petani untuk bergabung ke dalam grup *whatsapp* kelompok tani dan mengikuti beberapa hal lainnya yang terbatas dengan usia.

## 2) Pendampingan Pertanian Secara Khusus oleh Kuwowo

Prinsip Akuntabilitas menurut (Nurhidayat, 2023) adalah bentuk pertanggungjawaban atas setiap kegiatan dan program yang dilaksanakan kepada masyarakat. Kuwowo adalah perangkat desa yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mendampingi petugas irigasi yang disebut dengan “Waker” dan petani. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa saat ini Kuwowo sudah banyak tidak dimunculkan dalam pemerintahan. Namun, karena Desa Pandanajeng memiliki potensi pada sektor pertanian dengan mayoritas masyarakatnya sebagai petani, maka pemerintah desa merespon dengan tetap memunculkan peran dari Kuwowo. Berdasarkan hal tersebut responsivitas pemerintah desa juga tercermin dalam hal ini.

Kuwowo memiliki tugas utama untuk mengatur pengairan memastikan bahwa air yang tersedia untuk pertanian Desa Pandanajeng tercukupi. Kuwowo melakukan pengecekan terhadap kinerja waker sebagai petugas irigasi bahwasannya air telah diberikan sesuai dengan penjadwalan. Penjadwalan pengairan dilakukan agar air terdistribusi secara merata terlebih pada saat musim kemarau. Kuwowo juga bertugas untuk melakukan cek terhadap kebersihan dan kondisi saluran irigasi untuk memastikan kelancaran pengairan. Kunjungan di lapangan dilakukan satu minggu sekali atau satu minggu dua kali dan intensitas lebih sering ketika musim kemarau.

Kuwowo memberikan pendampingan terkait dengan aspirasi dan kendala yang dialami oleh waker dan petani dengan melakukan musyawarah dalam proses penyelesaiannya. Proses dalam penyusunan serta pembuatan suatu rencana pembangunan di desa dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang ditampung dalam musyawarah pembangunan desa (Hadawiya et al., 2021). Dalam hal ini dapat terlihat adanya penerapan prinsip partisipasi masyarakat karena melibatkan peran serta masyarakat secara aktif. Selain itu, proses musyawarah yang melibatkan masyarakat secara langsung berarti telah menerapkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan serta terdapat orientasi konsensus.

3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Pertanian

Responsivitas merujuk pada kemampuan pemerintah dalam memberikan respon terhadap kebutuhan dan keluhan yang dirasakan oleh masyarakat serta dapat memberikan langkah penyelesaian masalah (Ramadhani, 2025). Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pertanian sangat penting dalam optimalisasi potensi pertanian desa. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk mendukung pertanian terutama dalam hal pembangunan saluran irigasi dan jalan pertanian. Saluran irigasi dan jalan pertanian menjadi hal yang cukup krusial dalam mendukung pertanian. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Pandanajeng mengalokasikan dana desa untuk mendukung sektor pertanian terutama untuk pembangunan saluran irigasi dan jalan pertanian.

Saluran irigasi menjadi infrastruktur penting karena memiliki peran dalam penyediaan air untuk kebutuhan pertanian, peningkatan dalam produktivitas kegiatan pertanian, dan pengurangan resiko kekurangan air saat musim kemarau serta air berlebih yang dapat memicu banjir saat musim penghujan (Sianto, 2023). Jalan pertanian dibutuhkan oleh petani dalam menjalankan proses pertanian. Jalan pertanian atau biasa disebut dengan jalan usaha tani merupakan infrastruktur khusus pada wilayah pertanian (Sari et al., 2025). Jalan pertanian atau jalan usaha tani menjadi salah satu bentuk dukungan yang dirasakan oleh kelompok tani Sumber Tani Desa Pandanajeng. Pembangunan jalan usaha tani dinilai dapat memberikan kemudahan aksesibilitas para petani Desa Pandanajeng. Infrastruktur pertanian dengan kondisi yang kurang baik berakibat pada pembengkakan biaya produksi dan distribusi yang dapat berpengaruh terhadap rendahnya daya saing di hasil pertanian (Sihombing et al., 2023).

4) Membuka Peluang Kerja Sama dalam Bidang Pertanian

Hasil temuan peneliti di lapangan melalui wawancara, menunjukkan bahwa pemerintah desa tetap mengintervensi kerja sama antara petani dengan perusahaan untuk tujuan memastikan keamanan kerja sama dan menegosiasikan keuntungan yang akan diterima oleh petani di Desa Pandanajeng. Keuntungan yang diterima pemerintah desa sebagai hasil kerja sama maka akan dilaporkan berdasarkan kondisi detail yang semestinya pada laporan keuangan atau aset desa. Berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance*, maka prinsip akuntabilitas tercermin dalam hal ini di mana pemerintah desa tetap bertanggung jawab untuk keputusan pemberian izin kerja sama dengan swasta yang telah diberikan. Mekanisme pertanggungjawaban laporan ditulis dengan detail untuk memastikan prinsip transparansi diaktualisasikan dalam tata kelola pemerintahan (Arsik & Lawelai, 2020).

Pemerintah Desa Pandanajeng melakukan kerja sama dengan beberapa pihak dalam bidang pertanian. Pihak-pihak yang bekerja sama dengan Pemerintah Desa Pandanajeng dalam bidang pertanian antara lain Dinas Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian, akademisi dan praktisi, dan perusahaan dalam bidang pertanian yang biasa disebut dengan proyek. Pemerintah Desa Pandanajeng membuka ruang kerja sama dengan berbagai pihak yang dianggap dapat membantu mengoptimalkan potensi pertanian desa.

Kerja sama dengan Dinas Pertanian dilakukan untuk melakukan pembangunan pertanian desa sekaligus menyampaikan aspirasi terkait dengan kebutuhan pertanian. Pemerintah desa dapat melakukan kerja sama dengan Dinas Pertanian di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun pusat. Pemerintah desa juga menghadirkan peran BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) untuk memberikan penyuluhan kepada petani melalui kelompok tani. Akademisi dan praktisi dianggap dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan inovasi baru dalam memajukan pertanian desa. Pemerintah desa juga mendukung petani untuk bekerja sama secara langsung dengan beberapa perusahaan atau disebut “jagung proyek” dengan tetap memperhatikan perlindungan dan aspek keuntungan yang diberikan kepada petani. Peningkatan kesejahteraan petani memerlukan kerja sama dari pemerintah, organisasi yang bergerak dalam bidang pertanian, akademisi, serta sektor swasta untuk dapat memberikan dukungan, pelatihan, serta pendidikan yang dibutuhkan (Sumartan et al., 2024).

- 5) Mengimplementasikan Kebijakan dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan  
Prinsip efektifitas dan efisiensi dapat diartikan sebagai ketercapaian tujuan dengan penggunaan sumber daya yang optimal (Baik, P. Y. 2024). Peraturan menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025 Pasal 7 menjadi landasan instrumental dalam menganggarkan 20% dari Dana Desa untuk mendukung program Ketahanan Pangan. Anggaran tersebut digunakan oleh Pemerintah Desa Pandanajeng sebagai penyector modal di BumDes pada unit pertanian serta memberikan subsidi pupuk untuk petani yang menanam tanaman pangan padi dan jagung. Namun, karena mayoritas adalah petani sayur maka lebih dari subsidi pupuk petani padi dan jagung diberikan kepada petani sayur. Diversifikasi tanaman menjadi suatu usaha kompleks dengan skala luas yang bertujuan untuk peningkatan perekonomian dalam pertanian yang dapat dicapai melalui komoditas yang beranekaragam baik pada lingkup produksi, distribusi, dan konsumsi pada usaha tani regional maupun nasional demi mewujudkan pertanian tangguh (Sendjaja, 2023). Berdasarkan hal tersebut, ketercapaian tujuan dibentuknya strategi serta pertimbangan efisiensi anggaran dijadikan sebagai landasan pelaksanaan pemerintahan.

Swasembada pangan menjadi salah satu tujuan yang diinginkan dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan untuk ketahanan pangan dan gizi menjadi salah satu prioritas nasional (Tono et al., 2023). Oleh karena itu desa juga turut berperan dalam mendukung implementasi program ketahanan pangan sebagai agenda pembangunan nasional. Kondisi selama ini yang menunjukkan kerentanan pada komoditas pangan, keterbatasan lahan pertanian, kurangnya sarana dan prasarana pertanian, dan lemahnya penindakan saat panen dan setelahnya mendorong intervensi pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di berbagai sektor pertanian (Rumawas et al., 2021).

Tabel 4. Tanah Kas Desa Pandanajeng Tahun 2025

Jenis	Luas (Ha)
Keseluruhan Tanah Kas Desa	9,42
Tanah Kas Desa untuk Pertanian	8,85

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2025

Desa Pandanajeng pada dasarnya menyewakan tanah bengkok desa untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan masyarakatnya (Ramadani, 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tahun 2025 Tanah Kas Desa Pandanajeng disewa oleh BumDes dan difungsikan untuk pertanian. BumDes mengelola Tanah Kas Desa untuk menanam tanaman pendukung ketahanan pangan (padi dan jagung). Hal tersebut dilakukan sebagai contoh yang diberikan oleh pemerintah desa kepada para petani untuk menggencarkan keunggulan tanaman pangan sehingga dapat mewujudkan desa swasembada pangan sekaligus turut mendukung program ketahanan pangan. Pertanian tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan pangan melainkan juga berperan sebagai penyokong industri lain seperti kosmetik, pakan ternak, dan bio energi untuk pemenuhan kebutuhan lain (Rhofita, 2022).

### C. Faktor Pendukung

Strategi pemerintah desa dalam optimalisasi potensi pertanian Desa Pandanajeng, Kecamatan Tumpang, kabupaten Malang memiliki faktor pendukung baik dari sudut pandang pemerintah desa maupun masyarakatnya. Faktor pendukung menurut Pemerintah Desa Pandanajeng adalah sebagai berikut:

1. Situasi pemerintahan yang kondusif  
Pemerintahan yang kondusif menjadi pendukung dalam keberhasilan strategi optimalisasi potensi pertanian desa. Koordinasi yang baik tercipta dalam lingkungan internal pemerintah desa sehingga hubungan yang tercipta dengan masyarakat juga kondusif. Hal ini kemudian membuka terciptanya ruang kolaborasi dan sinergi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Situasi yang kondusif akan tercipta jika pemerintah desa dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugasnya secara profesional dan kecenderungan untuk lebih mementingkan kepentingan masyarakat umum (Rodiyah et al., 2021).
2. Dukungan dari pemerintah dengan hierarki di atasnya  
Pemerintah Desa Pandanajeng memiliki dukungan dari instansi pemerintahan pada tingkat di atas desa seperti kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan pusat dalam mendukung strategi yang dilaksanakan. Hal tersebut karena tingkat di atas desa dinilai memiliki *power* yang lebih jika dibandingkan dengan pemerintah desa baik dalam segi pendanaan dan urusan pemerintahan lainnya. Proses pembangunan pertanian membutuhkan dukungan dan intervensi dari pemerintah pada tingkat di atasnya.
3. Kemudahan akses informasi  
Kemudahan akses informasi memberikan keleluasaan dalam membuka jaringan kerja sama yang seluas-luasnya. Hal ini mendorong teraktualisasinya prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Kerja sama yang telah dilakukan tercipta karena adanya kemudahan dalam akses informasi. Keterjangkauan

lingkup kerja sama juga dapat diperluas dengan penggunaan teknologi informasi. Tanpa perlu kontak secara fisik internet dapat memberikan lebih banyak informasi dengan pertimbangan waktu yang lebih cepat jika dibandingkan dengan media konvensional (Sirajuddin & Liskawati Kamba, 2021).

Masyarakat Desa Pandanajeng juga memiliki sudut pandang terkait faktor pendukung dalam optimalisasi potensi pertanian desa. Faktor pendukung menurut sudut pandang masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Curah hujan yang mendukung  
Curah hujan Di Desa Pandanajeng dalam skala normal mendukung kegiatan pertanian. Dalam skala normal, curah hujan dapat memenuhi kebutuhan air dalam kegiatan pertanian. Selain itu, yang menyebabkan komoditas padi tumbuh subur di Desa Pandanajeng adalah karena curah hujan yang tercukupi.
2. Kelancaran penyaluran subsidi pupuk bagi petani padi jagung  
Pupuk merupakan masalah krusial bagi para petani dalam pengelolaan pertanian. Hal tersebut karena proses pengelolaan lahan tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pemupukan. Subsidi pupuk diberikan kepada petani padi dan jagung dalam mendukung program ketahanan pangan sebanyak 5 kwintal dalam satu kali datang dan disalurkan melalui kelompok tani. Subsidi pupuk tidak bisa dibagikan langsung kepada perorangan, tetapi dilakukan penataan melalui kelompok tani. Biaya produksi dalam hal pemenuhan pupuk dapat ditekan dengan adanya subsidi pupuk sebagai bantuan yang dirasakan oleh petani (Adiraputra & Supyandi, 2021). Hal tersebut mencerminkan adanya prinsip efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemerintahan.
3. Ketersediaan alat pertanian  
Alat pertanian dinilai cenderung mudah didapatkan oleh para petani dan buruh tani sehingga dapat memperlancar proses pertanian. Pemerintah desa juga memberikan alat pertanian berupa kultivator pada setiap kelompok tani yang dapat dipergunakan.
4. Banyaknya tenaga kerja  
Jumlah tenaga kerja yang cukup banyak dinilai dapat mendukung optimalisasi potensi pertanian desa. Hal tersebut karena para petani dan buruh tani dapat saling bekerja sama dan saling memberikan dukungan. Petani memberikan lapangan kerja bagi buruh tani, kemudian buruh tani memberikan bantuan bagi petani dalam pengelolaan lahan mulai dari persiapan, penanaman, proses panen, dan pasca panen. Kesejahteraan petani dapat diukur dari upah yang diterima oleh buruh tani karena menjadi tolak ukur kemampuan daya beli petani (Yacoub & Mutiaradina, 2020).

#### **D. Faktor Penghambat**

Strategi pemerintah desa dalam optimalisasi potensi pertanian Desa Pandanajeng, Kecamatan Tumpang, kabupaten Malang juga memiliki faktor penghambat baik dari sudut pandang pemerintah desa maupun masyarakatnya. Faktor penghambat menurut Pemerintah Desa Pandanajeng adalah sebagai berikut:

1. Faktor cuaca

Cuaca tidak hanya menjadi faktor pendukung, tetapi juga sekaligus menjadi faktor penghambat jika dalam kondisi yang tidak dapat diprediksi. Curah hujan berlebih akan berakibat pada tergenangnya lahan, sedangkan kemarau berkepanjangan akan membuat sektor pertanian kekurangan air.

2. Harga sayur tidak stabil

Proses pemasaran hasil panen dihadapkan pada hambatan tidak stabilnya harga sayur di pasar. Namun bukan berarti sayur yang dijual tidak laku, melainkan dibeli oleh pengepul dengan harga yang sangat rendah. Oleh karena itu tengkulak sayur dan petani lebih memilih untuk membagikan sayur daripada harus dijual dengan harga yang sangat murah. Penyebab tidak stabilnya harga sayur adalah panen raya yang tidak bisa diprediksi, sehingga harga sayur bisa saja sangat murah dan sangat mahal tanpa diketahui.

3. Terdapat provokator dalam kondusifitas hubungan pemerintah desa dengan masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu prinsip dalam *good governance*. Tidak semua masyarakat dapat turut memberikan kontribusi positifnya dalam mendukung strategi pemerintah. Adanya masyarakat yang menyebarkan provokasi dapat menjadi penghambat dalam kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Adanya provokator serta berita hoax yang beredar di masyarakat menjadi suatu hambatan dan memicu masalah jika diterima secara langsung tanpa mempertimbangkan kebenarannya (Dionysius, 2022).

4. Kerusakan akibat hama

Tikus merupakan salah satu hama sebagai faktor penghambat yang sering dialami oleh petani. Tikus memberikan dampak kerusakan terhadap tanaman dan lahan pertanian yang dikelola oleh petani sehingga dapat merusak kualitas hasil panen.

Masyarakat Desa Pandanajeng juga memiliki sudut pandang terkait faktor penghambat dalam optimalisasi potensi pertanian desa. Beberapa masyarakat berpendapat tidak ada hambatan dalam prosesnya. Namun, beberapa masyarakat juga mengungkapkan bahwa masih terdapat faktor penghambat yang dirasakan. Faktor penghambat menurut sudut pandang masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Adanya hama yang merusak tanaman dan lahan pertanian

Tikus menjadi sumber kerusakan yang banyak dirasakan oleh petani. Tidak hanya tanaman padi dan jagung yang mengalami kerusakan karena tikus, melainkan juga tanaman sayur mayur. Salah satu hama yang relatif sulit untuk dikendalikan adalah tikus sawah (Sepe & Suhardi, 2021). Selain itu, ayam dan ulat juga dapat merusak sayur yang ditanam sehingga berdampak pada kualitas hasil panen sayur.

2. Waktu tunggu proses perbaikan sarana dan prasarana

Responsivitas merujuk pada kemampuan pemerintah dalam memberikan respon terhadap kebutuhan dan keluhan yang dirasakan oleh masyarakat serta dapat memberikan langkah penyelesaian masalah (Ramadhani, 2025). Dalam hal ini, yang menjadi faktor penghambat adalah berkaitan dengan kecepatan waktu pemerintah desa dalam merespons kebutuhan masyarakat. Temuan penelitian

menunjukkan jika alasan hal tersebut adalah karena proses perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan tidak dapat dikerjakan secara langsung. Pemerintah desa harus mengikuti prosedur dan pedoman pembangunan yang berlaku. Kondisi ini kemudian membuat masyarakat memilih untuk mengerjakan secara gotong royong dengan para petani tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah desa. Bukan tanpa alasan, hal tersebut dipilih para petani karena proses pertanian berlangsung setiap harinya dan membutuhkan perbaikan sarana prasarana dengan waktu yang lebih cepat.

3. Keterlambatan subsidi pupuk bagi petani sayur

Pupuk menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh petani. Tidak hanya petani padi dan jagung, tetapi juga petani sayur. Seperti pada pembahasan sebelumnya, subsidi pupuk untuk petani sayur adalah jumlah lebih dari petani padi dan jagung. Kondisi ini kemudian berakibat pada keterlambatan subsidi pupuk yang dirasakan oleh petani sayur. Namun, pemerintah desa telah memiliki rencana agar subsidi pupuk bisa diberikan kepada lebih banyak petani. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi subsidi pupuk salah satunya adalah memastikan subsidi berjalan efektif untuk menjangkau penerima manfaatnya dengan tanpa meningkatkan kesenjangan maupun distorsi pada dinamika pasar (Putri, 2024). Hal tersebut menunjukkan masih adanya kekurangan dalam memastikan keefektifan program.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa pelaksanaan pemerintahan oleh Pemerintah Desa Pandanajeng dalam pembentukan strategi optimalisasi potensi pertanian telah mengaktualisasikan prinsip-prinsip *good governance* yakni partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, responsivitas, kesetaraan dan inklusifitas, serta orientasi konsensus. Potensi pertanian sayur sawi, bayam, kangkung sebagai *icon* desa direspon oleh pemerintah desa dengan membentuk beberapa strategi dalam optimalisasinya yakni 1) Pembentukan kelompok tani “Sumber Tani”, 2) Pendampingan pertanian oleh Kuwowo, 3) Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pertanian, 4) Membuka peluang kerja sama, dan 5) Mengimplementasikan kebijakan dalam mendukung program ketahanan pangan. Strategi tersebut menunjukkan hasil yang cukup baik dan dapat memberikan manfaat serta dukungan yang dirasakan oleh masyarakat khususnya para petani. Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam optimalisasi potensi pertanian desa baik menurut pemerintah desa maupun masyarakat. Meskipun demikian, beberapa faktor penghambat yang telah dipaparkan menunjukkan kondisi masih perlunya upaya tindak lanjut setelah proses evaluasi untuk dapat mengaktualisasikan prinsip-prinsip *good governance* secara utuh sehingga dapat mendukung keberhasilan strategi optimalisasi potensi pertanian desa yang lebih baik.

## Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang memberikan kontribusi terhadap penelitian sampai dengan selesainya artikel ini.

Penulisan artikel ini tentunya melalui proses yang cukup panjang untuk bisa terselesaikan dengan baik. Banyak pihak yang memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terselesaikannya artikel ini. Besar harapannya penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam ranah kajian ilmiah ilmu pemerintahan. Tidak hanya secara teoritis, penulis juga mengharapkan artikel ini dapat memberikan manfaat secara praktis.

### Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

### Daftar Pustaka

- Arifudin, O. (2021). Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi.
- Adiraputra, P., & Supyandi, D. (2021). Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Di Desa Sukaasih Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. 7(1), 594–606.
- Arsik, S. F., & Lawelai, H. (2020). Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.35326/jsip.v1i1.523>
- Ayun, Q., Kurniawan, S., & Saputro, W. A. (2020). Perkembangan Konversi Lahan Pertanian Di Bagian Negara Agraris. *Vigor: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika*, 5(2), 38–44. <https://doi.org/10.31002/vigor.v5i2.3040>
- Badan Pusat Statistika (BPS). (2023). Sensus tahun 2023. <https://sensus.bps.go.id/main/index/st2023>
- Badan Pusat Statistika (BPS). (2025). Nilai Ekspor Bulanan Hasil Pertanian Menurut Komoditas. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjMxMCMY/nilai-ekspor-bulanan-hasil-pertanian-menurut-komoditas--juta-us-.html>
- Basmalah, N. F., Fauziyah, E., & Zuhriyah, A. (2023). Strategi Pengembangan Sektor Pertanian Di Desa Tlontoraja, Kabupaten Pamekasan. *Agrica*, 16(2), 121–139. <https://doi.org/10.37478/agr.v16i2.2837>
- Batubara, M., & Pane, M. M. (2023). Pengaruh Pertanian terhadap Pendapatan Nasional. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7(1), 74–81. <https://doi.org/10.33059/jensi.v7i1.7690>
- Cahyani, H., Hanayeen, N., Nouval, A., Hoesny, M. U., Niaga, J. A., Malang, P. N., Niaga, J. A., & Malang, P. N. (2024). PELATIHAN USAHA KAWASAN PARIWISATA DI DESA. 227–237.
- Dionysius, B. E. (2022). Strategi Camat pada Pencegahan Konflik Sosial dalam Pelaksanaan Pilkades Tahun 2022 di Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa.
- Gusnar Ismail. (2022). Implementasi Otonomi Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(3), 190–205. <https://doi.org/10.55960/jlri.v8i3.342>
- Hadawiya, R., Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah*

- Magister Administrasi Publik, 3(2), 192–200.  
<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. [https://eprints.unm.ac.id/20838/1/buku Sapto METODOLOGI.pdf](https://eprints.unm.ac.id/20838/1/buku_Sapto_METODOLOGI.pdf)
- Kementerian Pertanian-Republik Indonesia. (2024). *Statistik Pertanian Tahun 2024*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Kompasiana. (2021). *Pemetaan Desa Pandanajeng, Mahasiswa KKN Universitas Negeri Malang 2021 Tinjau Kondisi Terbaru Desa*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/image/ullyamuhammad2323/60df95ef152510781b189302/pemetaan-desa-pandanajeng-mahasiswa-kkn-universitas-negeri-malang-2021-tinjau-kondisi-terbaru-desa?page=1>
- Kurniawan, D., Pemerintahan, I., Maritim, U., & Ali, R. (2025). *Sustainable Development Goals: Strategi Ekowisata Kabupaten Karimun*. 10(1). <https://doi.org/10.14710/jiip.v10i1.25033>
- Kurniawan, N. F., & IR, R. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sektor Pertanian Melalui Balai Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 5(1). <https://doi.org/10.35329/mitzal.v5i1.1849>
- Lestariningsih, S. P., & Ramadhani, E. (2024). Pemetaan Partisipatif Potensi Wisata Bantaran Sungai Sebagai Upaya Perencanaan Pembangunan Desa. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 238–249. <https://doi.org/10.37478/abdika.v4i2.3891>
- Malawat, S. H., & Octaviani, N. (2020). Kinerja Aparatur Desa Sebagai Ujung Tombak Pelayanan Publik Di Desa Keramat, Kabupaten Banjar. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 1(2). <https://doi.org/10.20527/jpp.v1i2.2444>
- Maulana, R., & Hasanah, D. I. (2024). Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Desa. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 8, 65–71. [https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/download/1373/1076?\\_\\_cf\\_chl\\_tk=zxBKDHC6ftrPQ8sXrpvUOL9\\_6faNUPk8kWcOw\\_9L\\_F4-1745108801-1.0.1.1-kVtJx3RIMBoz1X8DBL2XSluDVxmI5l8SjdFdovGmOlc](https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/download/1373/1076?__cf_chl_tk=zxBKDHC6ftrPQ8sXrpvUOL9_6faNUPk8kWcOw_9L_F4-1745108801-1.0.1.1-kVtJx3RIMBoz1X8DBL2XSluDVxmI5l8SjdFdovGmOlc)
- Mukhirto, M., & Fathoni, T. (2022). Strategi Pemerintah Desa Gandukepuh Terhadap Pengembangan Objek Wisata Religi. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 4(1), 23–35. <https://doi.org/10.37680/jcd.v4i1.1264>
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(1), 40–52. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5>
- Pane, A. A. (2023). Analisis Ekonomi Islam tentang Dampak Ekspor dan Impor terhadap Pendapatan Nasional. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 79–92. <https://doi.org/10.59342/istimrar.v2i1.258>
- Pasaribu, N. T. (2023). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. *Tata Kelola Pemerintah Desa*, 1(1), 1–12.

- file:///C:/Users/USER/Downloads/2.+ekonomi+Nina+Tresia+Pasaribu.pdf
- Pipit Mulyah, D., Aminatun, S. S., Nasution, T. H., & Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). Kedudukan Wanita dalam Islam. *Journal GEEJ*, 7(2), 17–62. <https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/lkhl/article/view/292>
- Pratiwi, K. E. (2021). Keputusan Diversifikasi Tanaman Untuk Mengejar Pembangunan Pertanian Di Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5(1), 63–77. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i1.240>
- Putri, M. A. (2024). Dinamika Subsidi dalam Mendorong Pertanian Berkelanjutan: Perspektif dari Tinjauan Literatur Sistematis. *JURNAL TRITON*, 15(2), 510–525.
- Ramadani, T. N. (2024). Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Bengko (Studi di Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang). *Dinamika*, 30(193), 9510–9524. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/23628>
- Ramadhan, R. (2024). in Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 55–67. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.328>
- Ramadhani, S. (2025). Efektivitas Pelayanan Publik pada Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Prinsip Good Governance. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora (Isora)*, 3(1), 75–84. <https://isora.safar.id/index.php/isora>
- Regency, M., Tondang, I. S., Ningsih, F. S., Syah, M. A., Agribisnis, P. S., Agribisnis, P. S., Bojonegoro, U., & Korespondensi, P. (2025). *www.agroteknika.id*. 8(August 2024), 137–152.
- Rhofita, E. I. R. (2022). Optimalisasi Sumber Daya Pertanian Indonesia untuk Mendukung Program Ketahanan Pangan dan Energi Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(1), 82. <https://doi.org/10.22146/jkn.71642>
- Riani, R., Zuriani, Z., Zahara, H., & Hafizin, H. (2021). Fungsi Kelompok Tani Pada Usaha Tani Padi Sawah di Gampong Uteun Bunta Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. *AgriFo: Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, 6(1), 23. <https://doi.org/10.29103/ag.v6i1.4941>
- Rodiyah, I., Sukmana, H., & Choiriyah, I. U. (2021). Pengembangan kapasitas SDM aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kenongo Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 32–41. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i1.5631>
- Rumawas, V. V, Nayoan, H., & Kumayas, N. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). *Governance*, 1(1), 1–12.
- Sari, N. P., Faizin, A., & Gunawan, C. (2025). *Perbaikan Jalan Pertanian Dusun Petung Sewu Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang*. 12(1).
- Sendjaja, T. P. (2023). Karakteristik Pelaku Sistem Agribisnis Dan Pengembangan Diversifikasi Pertanian. *Jurnal Prospek Agribisnis UNPAD*, 1(1), 97–108.
- Sepe, M., & Suhardi, S. (2021). Pengendalian Tikus Sawah (*Rattus Argentiventer*) dengan Sistem Bubu Perangkap dan Perangkap Bambu Pada 3 Zona Habitat Tikus di Kabupaten Pinrang Kota Makassar. *AGROVITAL: Jurnal Ilmu Pertanian*, 6(1), 38. <https://doi.org/10.35329/agrovital.v6i1.2004>
- Sholihah, E. N., Gutama, W. A., & Prayoga, K. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Relationship Marketing Petani Sayur dan Pedagang Pengepul

- Di Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. *Malang (ID): Repository Universitas Brawijaya*, 650–659. <https://core.ac.uk/download/pdf/295746896.pdf>
- Sianto, L. (2023). Program Peningkatan Saluran Irigasi Desa Labulu-bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna. *Anoa: Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik*, 1(02), 39–47. <https://doi.org/10.51454/anoa.v1i02.290>
- Sihombing, A., Sipayung, T., Damanik, S. E., & Nainggolan, P. (2023). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan, Pertanian Dan Kesehatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Regional Planning*, 5(2), 79–89. <https://doi.org/10.36985/jrp.v5i2.755>
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabilla, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295–302. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1465>
- Sirajuddin, Z., & Liskawati Kamba, P. (2021). Farmer's Perception on Information and Communication Technology Implementation in Agricultural Extension. *Jurnal Penyuluhan*, 17(2), 136–144.
- Sumartan, Nugraha, R., Suriadi, Rahman, U., Wahyuddin, N. R., & Yanti, N. E. (2024). Meningkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Penyuluhan Pertanian Berbasis Agribisnis Di Desa Cenrana Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Abdi Insani*, 11(1), 811–824. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i1.1325>
- Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Publika*, 365–380. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p365-380>
- Tono, Ariani, M., & Suryana, A. (2023). KINERJA KETAHANAN PANGAN INDONESIA: PEMBELAJARAN DARI PENILAIAN DENGAN KRITERIA GLOBAL DAN NASIONAL. *Badan Riset Dan Inovasi Nasional Jalan Gatot Subroto*, 21(1), 1–20. <http://dx.doi.org/10.21082/akp.v21n1.2023.1-20>
- Yacoub, Y., & Mutiaradina, H. (2020). Analisis Kesejahteraan Petani dan Kemiskinan Perdesaan di Indonesia. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 92–102. <http://feb.untan.ac.id/>

### Daftar Narasumber

- Muhammad Edy Masyur, S.ST.Par., Kepala Desa Pandanajeng, 13 Juni 2025, pukul 10.30 WIB.
- Imam Mashudi, S.Ag., Sekretaris Desa Pandanajeng, 13 Juni 2025, pukul 09.20 WIB.
- Indra Gunawan Prasetyo, Kuwowo Desa Pandanajeng, 23 Juni 2025, pukul 14.00 WIB.
- Wanuji, Ketua Kelompok Tani IV Desa Pandanajeng, 19 Juni 2025, pukul 18.30 WIB.
- Wahyudi Slamet Rianto, Petani sayur Desa Pandanajeng, 19 Juni 2025, pukul 18.00 WIB.
- Suli, Petani padi dan jagung Desa Pandanajeng, 20 Juni 2025, pukul 17.45 WIB.
- Sumilah, Buruh tani Desa Pandanajeng, 16 Juni 2025, pukul 15.20 WIB.
- Kanifan Abadi, Tengkulak sayur Desa Pandanajeng, 25 Juni 2025, pukul 18.00 WIB. .

### Catatan

1. Kuwowo adalah perangkat desa yang bertugas untuk mendampingi waker (petugas irigasi) dan petani.
2. Waker adalah penyebutan untuk petugas irigasi.
3. Kultivator adalah alat untuk membajak sawah.

### Tentang Penulis

**Serlina Putri Setyowati** adalah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Departemen Hukum dan kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Penulis terlibat aktif dalam penelitian kajian kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan.

**Muhammad Mujtaba Habibi** adalah Dosen Departemen Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Bidang kajian penulis yaitu Kebijakan Publik dan Pemerintahan Daerah dan Desa.